BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 224 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN SOREANG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Soreang untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Soreang untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Soreang serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Soreang adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan Soreang untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada rancangan Renstra Kecamatan Soreang Tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1) Renja Kecamatan Soreang Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rancangan Renstra Kecamatan Soreang Tahun 2025-2029 yang akan digunakan Kecamatan Soreang untuk melaksanakan rencana kerja Kecamatan Soreang.
(2) Renja Kecamatan Soreang Tahun 2026 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Soreang tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Soreang;
    b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antara Renja Kecamatan Soreang dengan dokumen RKPD dan Renstra Kecamatan Soreang;
    c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Kecamatan Soreang yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
    d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Soreang digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA.

(2) Renja Kecamatan Soreang selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra Kecamatan Soreang Tahun 2025-2029.

BAB II
DOKUMEN RENJA KECAMATAN SOREANG

Pasal 5

(1) Isi dan uraian dokumen Renja Kecamatan Soreang Tahun 2026 disusun dengan sistematika:
   a. bab I latar belakang dan dasar hukum;
   b. bab II hasil evaluasi Renja Kecamatan Soreang tahun lalu;
   c. bab III tujuan dan sasaran;
   d. bab IV rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
   e. bab V penutup; dan
   f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Isi dan uraian dokumen Renja Kecamatan Soreang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA KECAMATAN SOREANG

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Soreang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja Kecamatan Soreang meliputi:

a. semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab Kecamatan Soreang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Soreang;
b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUAPPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara Kecamatan Soreang dengan DPRD; dan

d. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja Kecamatan Soreang.

Pasal 7

(1) Kecamatan Soreang membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja Kecamatan Soreang.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja Kecamatan Soreang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/atau perubahan Renja Kecamatan Soreang tahun berjalan.
(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik.
(6) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Camat Kecamatan Soreang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Soreang dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Soreang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Soreang terhadap pelaksanaan dan hasil Renja Kecamatan Soreang.

(3) Camat Kecamatan Soreang menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja Kecamatan Soreang.

(4) Pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan Soreang dilakukan pada saat penyusunan RKA.

BAB V
PERUBAHAN RENJA KECAMATAN SOREANG

Pasal 9

(1) Renja Kecamatan Soreang dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 8; dan
   c. terdapat adanya penyesuaian tujuan dan sasaran Kecamatan Soreang beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra Kecamatan Soreang Tahun 2025-2029.

(2) Perubahan Renja Kecamatan Soreang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja Kecamatan Soreang tahun 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 224

PERATURAN BUPATI

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN SOREANG PEMERINTAH KEBUPATEN BANDUNGTAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

I. I. Latar Belakang
I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja Kecamatan Soreang Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2026 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

c. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

d. Undang-Undang dan/atau Peraturan yang berkaitan dengan SKPD yang bersangkutan

e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115);

n. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

o. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 39)

I.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud Rencana Kerja Kecamatan Soreang Tahun Anggaran 2026 disusun dengan maksud sebagai acuan arah kebijakan Pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan oleh Kecamatan Soreang.

2. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Soreang adalah sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan, serta menyusun program dan kegiatan secara teadu, terarah dan terukur sehingga memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah untuk memahami dan menilai arah kebijakan program serta kegiatan operasional tahunan.

I.4 Sistimatika

BAB I PENDAHULUAN

Menguraiakan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Soreang , agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang Memuat tentang Renja Kecamatan Soreang , proses penyusunan Renja Kecamatan Soreang, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja.
1.2 Landasan Hukum Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Kecamatan Soreang Tahun 2026
1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Soreang .
1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Soreang serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja 16 Kecamatan Soreang Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n 1)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Soreang.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Soreang.
2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Soreang.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Soreang
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Soreang Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Soreang .
3.3 Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SOREANG PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNGTAHUN 2025

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Soreang. Kabupaten Bandung

II.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

II.4. Review terhadap RKPD Kabupaten Bandung

II.5. Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

III.3. Program dan Kegiatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG

IV.1 Kebutuhan Anggaran Belanja Dinas Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

BAB V

PENUTUP

V.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

V.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

V.3. Rencana Tindak Lanjut

Soreang, 8 Juli 2025

CAMAT SOREANG

Ttd

HARIS TAUPIK

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga.

Penyusunan Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Soreang Tahun 2026 Sejalan dengan proses penyusunan Ranhir Rencana Kerja (Renja)Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2026, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Ranhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Menindaklanjuti hasil penyusunan Ranhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 di dalam, perlu disusun dokumen Ranhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2026. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, penyusunan Ranhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan mengacu pada arahan sebagai berikut :

1. Berpedoman kepada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, serta Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 mengatur tentang Ranhir kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Peraturan ini terkait dengan hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Penyusunan Ranhir Rencana Kerja (Renja)Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah 2026-2029 dan

evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2024) dan Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2025;

3. Mempedomani Ranhir RKPD Tahun 2026 serta mengacu terhadap sasaran dan prioritas pembangunan daerah, dan program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator, target kinerja dan pagu indikatif;
4. Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah (Pasal 16 Ayat (2) Permendagri No 86 Tahun 2017):
    i. Persiapan Penyusunan,
    ii. Penyusunan Rancangan,
    iii. Perumusan Rancangan Akhir,
    iv. dan Penetapan;
5. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026 dan disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
    i) Pendahuluan,
    ii) Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, i
    iii) Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah,
    iv) Rencana Kerja (Renja)dan pendanaan Perangkat Daerah, dan
    v) Penutup; dan

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dokumen Ranhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu.

Ranhir Rencana Kerja (Renja)Kecamatan Soreang tahun 2026 mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai pedoman bagi Kecamatan Soreang dalam melaksanakan secara akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin keberhasilan program dan kegiatan serta ketercapaian terhadap indicator kinerja utama yang tentunya harus mempunyai dampak (impact) yang dapat dirasakan oleh warga masyarakat Kecamatan Soreang melalui program dan kegiatan dalam Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pelayanan Publiknya.

Demikian agar menjadi perhatian, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi aktif dalam penyusunan Ranhir Rencana Kerja (Renja) Awal Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2026

Soreang, 8 Juli 2025

CAMAT SOREANG



Drs. HARIS TAUPIK
Nip. 19700605 19901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Mekanisme Penyusunan 8

BAB II..... 12

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)KECAMATAN SOREANG TAHUN LALU.... 12

2.1 Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja)Kecamatan Soreang Tahun Berjalan 12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Soreang 39

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 52

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD 64

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 82

BAB III..... 84

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SOREANG..... 84

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 84

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 89

3.3 Program dan Kegiatan 116

BAB IV..... 135

RENCANA KERJA (RENJA)DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 135

4.1 Rencana Kerja 135

4.2 Pendanaan 137

BAB V..... 156

PENUTUP..... 156

5.1 Catatan Penting 156

5.2 Kaidah Pelaksanaan 156

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa stiap Perangkat Daerah diharuskan untuk Menyusun Rencan Kerja Perangkat Daerah sebagi acuan perencanaan kegiata perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Rencana Strategis) Perangkat Daerah yang mengambarkan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanka oleh perangkat daerah.

Kecamatan Soreang dalam hal ini sebagai Perangkat Daerah yang difokuskan sebagai penyelenggaran urusun penyelenggara pelayanan publik dimana system penyelenggaraan pemerintahanya memprioritaskan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum kewilayahan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bandung nomor 137/Kep.862-TAPEM.2023 tentang Ranhir atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769- TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yangMenjadi Kewenangan Daerah. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Perencanaan adalah kunci dalam keberhasilan dimana E-planning, E- begetting dan E- Actuating pembangunan sangatlah diperlukan guna memastikan target pembangunan beserta tahapan-tahapan dalam mencapai target menjadi lebih terarah. Perencanaan pembangunan memiliki peran utama dalam mengarahkan

pembangunan menuju target yang telah ditetapkan secara efektif melalui pengalokasian sumber daya yang efisien. Sesuai dengan apa yag telah di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rencana Tata Cara Ranhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja (Renja)Pemerintahan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Iventarisasi Pemuktahiran Kalsifikasi, Kode Fikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan sebagai penyelaras pembangunan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pemerintah Pusat mengatur dan menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan bersinergi antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan, terhadap kemajuan pembangunan wilayah. Dalam undang-undang tersebut, perencanaan pembangunan di level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, baik untuk perencanaan jangka panjang, menengah, maupun tahunan,

dilaksanakan dan diatur dalam satu koridor dengan kesatuan tata cara perencanaan, sehingga sinkronisasi antar perencanaan pembangunan dapat terwujud.

Sejalan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 mengatur perencanaan pembangunan internal Kabupaten Bandung dalam satu Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD). Mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, pasal 11 ayat (3), salah satu rencana pembangunan yang wajib disusun perangkat daerah yaitu Rencana Kerja (Renja)perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan

perangkat daerah jangka pendek satu tahun untuk menjaga sinergitas pembangunan antar waktu dan antar fungsi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, Pada pelaksanaa perencanaan pembangunan RPJMD mengacu kepada penetapan RPJMD 2021-2026 sebagai dasar dalam penyusunan Ranhir Rencana Kerja (Renja) Awal Tahun 2026.

Untuk terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada tujuan (*goals*) dan juga berorientasi kepada proses, penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026 secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dengan menggunakan metode partisipatif, target pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 Kabupaten Bandung diharapkan lebih mencerminkan aspirasi seluruh kalangan yang tertampung dalam rencanan kerja SKPD. Dengan melalui pendekatan politis, penyusunan program pembangunan dilakukan sejalan dalam mendukung visi, misi, dan program kepala daerah yang dikonsultasikan dalam pembahasan dengan DPRD untuk menghasilkan produk hukum yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan. Sementara melalui pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, rencana pembangunan dalam RKPD Tahun 2026 Kabupaten Bandung diselaraskan dalam mekanisme capaian kinerja dari Tahun 2023 sampai dengan tahun berjalan 2024 dan ditunjang dengan capaian mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari lingkup desa, kecamatan, hingga kabupaten, yang selanjutnya hasil kesepakatannya menjadi draf evaluasi usulan pada musrenbang provinsi dan nasional. Dalam pelaksanaannya, proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah untuk memungkinkan proses perencanaan menjadi lebih efisien. Melalui sistem tersebut, pengajuan usulan desa dan kecamatan beserta proses verifikasi dapat dilaksanakan dari jarak jauh dengan berbasis internet. Selain dari pada itu penggunaan aplikasi ini menjadikan perencanaan lebih transparan sebab memungkinkan pengawasan untuk dilakukan

pada keseluruhan tahapan proses, sehingga hasil perencanaan dapat lebih akuntabel

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat (6) menyebutkan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan sebagian pelaksanaannya kepada camat untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dalam penyelengaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja pemerintah kabupaten,

Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Bandung Noomor Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.862-TAPEM/2023 tentang Ranhir Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor ; 137.1/Kep.769-TAPEM/2023 Pelimpahan Sebagian Kewenagan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan, terdapat 29 Bidang Pelimpahan, 23 sub bidang Pelimpahan, dan 321 Rincian Pelimpahan dengan Pelimpahan berupa Pelaksanaan, Koordinasi, Rekomendasi, Pembinaan, dan Fasilitasi (Perizinan dan Non Perizinan) dengan di prioritas kan menjadi 13 Program Strategis Kabupaten Bandung dan Tiga Program Prioritas Kabupaten Bandung.

Peyusunan Rancangan Ranhir Rencana Kerja (Renja)(Rencana Kerja) Kecamatan Soreang Tahun 2026 disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Target yang akan dicapai dimana penyesuaian terhadap Dokumen Rencana Strategis penyelarasan dengan dokumen Perencanaan Kabupaten Bandung (RPJMD dan RKPDP) diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi dalam peningkatan Penyelenggaran Pelayanan Publik di Kecamatan Soreang.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015-2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 InmendagriNo. 2/2025

1. PedomanPenyusunanRencanaPembangunan JangkaMenengahDaerah dan RencanaStrategisPerangkatDaerah Tahun2025-2029

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Perencanaan Rencangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah serta tata Cara Ranhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan RencanaKerja Pemerintah daerah.
7. InmendagriNo. 2/2025 PedomanPenyusunanRencanaPembangunan JangkaMenengahDaerah dan RencanaStrategisPerangkatDaerah Tahun2025-2029
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005-2026.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.

11. Peraturan Daerah. Bandung Kabuapten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 RencanaPembangunan JangkaPanjang Daerah tahun 2025-2045
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.

3. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bandung.
4. Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2019 tentang Ranhir Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2026;
5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung;
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 135 Tahun 2021 tentang Pedoman Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 87 Tahun 2022 tentang Ranhir Atas Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
8. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja (Renja)Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 92);
10. Peraturan Daerah. Bandung Kabuapten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 RencanaPembangunan JangkaPanjang Daerah tahun 2025-2045
11. Peraturan Daerah. Bandung Kabuapten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 RencanaPembangunan JangkaPanjang Daerah tahun 2025-2045
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.

13. Keputusan Bupati Bandung Nomor Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.862-TAPEM/2023 tentang Ranhir Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor ; 137.1/Kep.769-TAPEM/2023 Pelimpahan Sebagian Kewenagan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Ranhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dimaksudkan untuk:

a. Dalam rangka melaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis

a. Memastikan perencanaan, pemilihan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, Renstra Ranhir, dan RKPD

a. Sebagai tolok ukur dalam pencapaian strategi dan kebijakan umum pembangunan yang berkelanjutan di Kecamatan Soreang

Tujuan penyusunan Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2026 adalah :

a. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan Tahun berjalan sebagai bahan penyusunan Ranhir Renja Kecamatan Soreang Tahun 2026
a. Memberikan acuan bagi Kecamatan Soreang dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
a. Memberikan acuan bagi Kecamatan Soreang dalam menentukan lokasi kegiatan pada periode tahun berjalan dan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

a. Memberikan acuan bagi Kecamatan Soreang dalam menyusun dan mengevaluasi indikator kinerja kegiatan periode tahun berjalan dan satu tahun yang akan datang.
a. Memberikan acuan bagi Kecamatan Soreang dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4 Mekanisme Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraiakan mengenai gambaran umum penyusunan Ranhir Rencana Kerja (Renja)Kecamatan Soreang, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Ranhir Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Ranhir Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Ranhir Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen..

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Tahun Berjalan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Ranhir Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Prangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap RKPD Tahun 2024 dan Tahun Berjalan

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Soreang

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Ranhir Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan terkait Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
a. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Jumlah program dan jumlah kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu). Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
a. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan daerah yang dijabarkan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja)(Renja) SKPD untuk diarahkan dalam pencapaian sasaran dan target pembangunan yang belum dapat dicapai.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
a. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
a. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SOREANG TAHUN LALU DAN TAHUN BERJALAN

2.1 Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Soreang Tahun Lalu

Secara umum Ranhir Recana Kerja Kecamatan Soreang Tahun 2026 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional yang tertuang dalam Renstra Ranhir Kecamatan Soreang Tahun 2021 - 2026. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan tahun berjalan, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Ranhir SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan - kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun – tahun mendatang.

Pada tahun anggaran tahun berjalan 2025 Kecamatan Soreang telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsinya, Pelaksanaan Renja Kecamatan Soreang Tahun 2025 dapat mencapai target secara kinerja maupun secara serapan anggaran. Kecamatan Soreang dengan anggaran

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		Tingkat Capaian (%)	PD
			K	RP	K	RO		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
7	UNSUR KEWILAYAHAN			6712742017		5.604.311.335	83,49%	
7,01	KECAMATAN			6,712,742,017		5,604,311,335		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	76,56	5,774,771,752	80.60 Point	4,666,838,835	104.83 Point	Kec. Soreang
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	Prosentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen	100 Persen	50,618,000	100 Persen	50,617,200	100	Kec. Soreang

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		Tingkat Capaian (%)	PD
			K	RP	K	RO		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi,						
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16,996,000	2 Dokumen	16,996,000	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10,022,000	2 Dokumen	10,022,000	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Ranhir RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Ranhir RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Ranhir RKA-SKPD	2 Dokumen	3,200,000	2 Dokumen	3,199,800	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,200,000	1 Dokumen	3,199,800	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Ranhir DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Ranhir DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Ranhir DPA-SKPD	1 Dokumen	3,200,000	1 Dokumen	3,199,800	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7,800,000	1 Laporan	7,800,000	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6,200,000	1 Laporan	6,199,800	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaaian Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan	100 Persen	5,070,874,824	100 Persen	3,991,828,296	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	241 Orang/bulan	5,067,674,824	241 Orang/bulan	3,988,628,696	100	Kec. Soreang

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		Tingkat Capaian (%)	PD
			K	RP	K	RO		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,200,000	1 Laporan	3,199,600	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0		0		Kec. Soreang
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0		0		Kec. Soreang
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0		0		Kec. Soreang
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase kesesuain barang milik daerah dalam data base	100 Persen	3,200,000	100 Persen	3,199,800	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3,200,000	1 Laporan	3,199,800	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0		0		Kec. Soreang
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0		0		Kec. Soreang
7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0		0		Kec. Soreang
7.01.01.2.03.03	Pengamanan Barang Milik Daerah			0		0		Kec. Soreang
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional Pelayanan Administrasi dan Umum Kantor	100 Persen	156,464,200	100 Persen	155,991,700	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5,130,000	15 Paket	5,129,400	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	10 Paket	50,000,000	10 Paket	49,824,800	100	Kec. Soreang

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		Tingkat Capaian (%)	PD
			K	RP	K	RO		
		Kantor yang Disediakan						
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	42 Paket	10,000,000	42 Paket	9,901,900	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			0		0		Kec. Soreang
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	10,000,000	5 Paket	9,999,600	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	4,914,000	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			0		0		Kec. Soreang
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	14,978,000	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	61,334,200	1 Laporan	61,244,000	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan operasional Pelayanan Administrasi dan Umum Kantor	100 Persen	0	100 Persen	0	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0	12 Unit	0	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	100 Persen	270,724,728	100 Persen	259,378,790	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	65,569,728	1 Laporan	55,845,030	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	4 Laporan	203,155,000	4 Laporan	201,533,760	100	Kec. Soreang

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		Tingkat Capaian (%)	PD
			K	RP	K	RO		
		Umum Kantor yang Disediakan						
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	222,890,000	100 Persen	205,823,049	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	70,820,000	8 Unit	54,698,000	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2,070,000	12 Unit	2,070,000	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,000,000	1 Unit	149,055,049	100	Kec. Soreang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi,	100	432,549,500	100 Persen	432,409,600	100.00 Persen	Kec. Soreang
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Persen	13,215,900	100 Persen	13,125,000	100	Kec. Soreang
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	13,215,900	1 Dokumen	13,125,000	100	Kec. Soreang
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	100 Persen	5,210,000	100 Persen	5,210,000	100	Kec. Soreang

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		Tingkat Capaian (%)	PD
			K	RP	K	RO		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5,210,000	1 Laporan	5,210,000	100	Kec. Soreang
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 Persen	21,428,000	100 Persen	21,379,200	100	Kec. Soreang
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	21,428,000	1 Dokumen	21,379,200	100	Kec. Soreang
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Urusan Pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan	100 Persen	392,695,600	100 Persen	392,695,400	100	Kec. Soreang
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	392,695,600	1 Laporan	392,695,400	100	Kec. Soreang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100	258,677,000	100 Persen	258,668,000	100.00 Persen	Kec. Soreang
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase koordinasi pemberdayaan desa	100 Persen	164,625,000	100 Persen	164,622,000	100	Kec. Soreang
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	161,325,000	1 Laporan	161,322,000	100	Kec. Soreang
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga kemasyarakatan	3,300,000	4 Lembaga kemasyarakatan	3,300,000	100	Kec. Soreang
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga	Persentase capaian Lembaga	100 Persen	94,052,000	100 Persen	94,046,000	100	Kec. Soreang

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		Tingkat Capaian (%)	PD
			K	RP	K	RO		
	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kemasyarakatan yang terfasilitasi						
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Dokumen	18,443,000	1 Dokumen	18,440,000	100	Kec. Soreang
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumena Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	55,446,000	4 Lembaga Kemasyarakatan	55,446,000	100	Kec. Soreang
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	20,163,000	1 Laporan	20,160,000	100	Kec. Soreang
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100	68,456,000	100 Persen	68,455,800	100.00 Persen	Kec. Soreang
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	53,456,000	100 Persen	53,455,800	100	Kec. Soreang
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	44,796,000	1 Laporan	44,796,000	100	Kec. Soreang
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	8,660,000	1 Laporan	8,659,800	100	Kec. Soreang
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan	100 Persen	15,000,000	100 Persen	15,000,000	100	Kec. Soreang

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		Tingkat Capaian (%)	PD
			K	RP	K	RO		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000	100	Kec. Soreang
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100	60,823,000	100	60,649,000	100.00	Kec. Soreang
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100 Persen	60,823,000	100 Persen	60,649,000	100	Kec. Soreang
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	7,520,000	50 Orang	7,520,000	100	Kec. Soreang
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40 Orang	19,733,000	40 Orang	19,559,000	100	Kec. Soreang
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	33,570,000	1 Dokumen	33,570,000	100	Kec. Soreang
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100	117,464,765	100 Persen	117,290,100	100.00 Persen	Kec. Soreang

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		Tingkat Capaian (%)	PD
			K	RP	K	RO		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			117,464,765		117,290,100		Kec. Soreang
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	19,901,600	100	Kec. Soreang
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	100	Kec. Soreang
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	47,464,765	1 Dokumen	47,388,500	100	Kec. Soreang

Urusan ini dilaksanakan oleh KECAMATAN SOREANG dengan anggaran sebesar Rp 6,712,742,017,- dan terealisasi sebesar Rp 5,604,311,335,- atau 83,49%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program yang terdiri dari 14 kegiatan yang terdiri dari 34 sub kegiatan yang di fokuskan pada 3 target sasaran utama

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi memiliki target yaitu 76,68 point pada Tahun Anggaran 2024, capaian berhasil terealisasi dengan hasil capaian 80,60 point.
2. Persentase BMD dalam kondisi baik memiliki target yaitu 98,00 % pada Tahun Anggaran 2024, capaian berhasil terealisasi dengan hasil capaian 98,75 %.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki target yaitu 90,07 point pada Tahun Anggaran 2024, capaian berhasil terealisasi dengan hasil capaian

98,25 point.

4. Prosentase Adminstrasi Desa yang baik memiliki target yaitu 80,00 % pada Tahun Anggaran 2024, capaian berhasil terealisasi dengan hasil capaian 100,00%.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2022. Capaian IKU Kecamatan Soreang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Soreang Tahun 2024

No	MISI	TUJUAN	IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,07 Poin	98,75 Poin	Tercapai sebesar 105%

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Soreang adalah sebesar 91.75 Poin, capaian tersebut telah melebihi target dan tercapai sebesar 100.05%. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target Renstra Ranhir 2021-2026 pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Soreang adalah sebagai berikut

Tabel 2.2
Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Soreang Sampai dengan Tahun 2024 dan perbandingan dengan target Renstra Ranhir 2021 -2026

No	MISI	TUJUAN	IKU	Target Renstra Ranhir 2021-2026	Realisasi sampai dengan Tahun 2023	Persentase Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[3]	[4]	[5]
1	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,07 Poin	98,25 Poin	Tercapai sebesar 111,614%

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Soreang Sampai dengan Tahun 2023 sebesar 91,07 Poin Apabila dibandingkan dengan target Renstra Ranhir 2021-2026 sebesar 98,25 Poin, target tersebut telah tercapai sebesar 111,64 persen.

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dengan memperbandingkan capaian dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Kecamatan Soreang telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Camat Soreang dengan Bupati Bandung. Hasil pengukuran atas kinerja ketercapaian sasaran strategis Kecamatan Soreang tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.3
Hasil pengukuran atas kinerja ketercapaian sasaran strategis Kecamatan Soreang tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	77,70 Poin	80,60 Poin	Tercapai sebesar 103%
		Persentase BMD dalam kondisi baik	98,25	98,50	Tercapai sebesar 100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98,03 Poin	98,25 Poin	Tercapai sebesar 100,07%
3	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Persentase Desa Beradministrasi baik	100 %	100 %	Tercapai sebesar 100%
Rata - Rata Capaian					100%

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja Kecamatan Soreang tahun 2023 sesuai dengan target dan rata-rata capaian Kecamatan Soreang terhadap target sasaran strategis sebesar 100%. Perbandingan Antara Hasil pengukuran atas kinerja ketercapaian sasaran strategis Kecamatan Soreang tahun 2022 dan perbandingan dengan target Renstra Ranhir 2021-2026 menunjukan hasil sebagai berikut

Tabel 2.4
Realisasi Sasaran Strategis Kecamatan Soreang Sampai dengan Tahun 2024 dan perbandingan dengan target Renstra Ranhir 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Renstra Ranhir 2021-2026	Realisasi sampai dengan Tahun 2024	Persentase Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	77.70 Poin	80,60, Poin	Tercapai sebesar 103 %
		Persentase BMD dalam kondisi baik	98,06%	98,25 %	Tercapai sebesar 100 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.00 Poin	98,75 Poin	Tercapai sebesar 110.%
3	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Persentase Desa Beradministrasi baik	100%	100%	Tercapai sebesar 100 %
Rata-Rata Persentase Capaian					100%

Realisasi Perjanjian Kinerja Kecamatan Soreang sampai dengan tahun 2023 dan Perbandingan dengan target Renstra Ranhir 2021-2026 adalah sebagai berikut.

2.1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Soreang sampai dengan tahun 2024 sebesar 80,60 Poin Apabila dibandingkan dengan Target Renstra Ranhir 2021-2026 sebesar 77,70 Poin, telah tercapai sebesar 103 persen terdapat kemajuan yang signifikan.

2.1.2 Persentase BMD dalam kondisi baik

Realisasi Persentase BMD dalam kondisi baik Kecamatan Soreang sampai dengan tahun 2024 sebesar 98,25 % Apabila dibandingkan dengan Target Renstra Ranhir 2021-2026 sebesar 98,06 %, telah tercapai sebesar 100 persen.

Dari seluruh realisasi diatas dapat disimpulkan bahwa Rata-Rata Persentase Realisasi Perjanjian Kinerja Kecamatan Soreang Sampai

dengan Tahun 2024 dan perbandingan dengan target Renstra Ranhir 2021-2026 sebesar 100 %

2.1.3 Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki target yaitu 90,07 point pada Tahun Anggaran 2024, capaian berhasil terealisasi dengan hasil capaian 98,25 point.

2.1.4 Prosentase Adminstrasi Desa yang baik memiliki target yaitu 80,00 % pada Tahun Anggaran 2024, capaian berhasil terealisasi dengan hasil capaian 100,00%.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2024, pelaksanaan kinerja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung ditunjang dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:

Tabel 2.5 (TC.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)Kecamatan Soreang dan Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Soreang s/d Tahun 2026 (tahun berjalan)*
Kabupaten Bandung

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2026			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)=(7/6)	(9)		(10)	(11)=(5+7+10)		(12)=(11/4)
	KECAMATAN SOREANG																
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7.01	KECAMATAN																
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik	77.00	Poin	77,70	Poin	78,68	Poin	80,60	Poin	102%	76,75	Poin	76,75		Poin	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Prosentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi,*	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	-		Persen	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	1	5	Dokumen	2,50
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	1	5	Dokumen	2,50

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2026			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Ranhir RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Ranhir RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Ranhir RKA-SKPD*	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	1	5	Dokumen	2,50
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	3	Dokumen	3,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Ranhir DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Ranhir DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Ranhir DPA-SKPD*	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	3	Dokumen	3,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	3	Laporan	3,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	3	Laporan	3,00
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		0	Dokumen	0	0	Dokumen	-
7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah*	0	Data	0	Data	0	Data	0	Data		0	Data	0	0	Data	-
															0		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Prosentase Capaaian Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan*	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100		Persen	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2026			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	21	Orang/bulan	21	Orang/bulan	21	Orang/bulan	21	Orang/bulan	100%	21	Orang/bulan	19	61	Orang/bulan	2,90
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		0	Dokumen	1	1	Dokumen	1,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	3	Laporan	3,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	3	Laporan	3,00
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	3	Dokumen	3,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Prosentase kesesuain barang milik daerah dalam data base*	100 Persen	Persen	100 Persen	Persen	100 Persen	Persen	100 Persen	Persen		100 Persen	Persen	0	0	Persen	-
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		Dokumen	Dokumen	1	1	Dokumen	1,00
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	Laporan	Laporan	1	3	Laporan	3,00
															0		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2026			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu*	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen			Persen	-
7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit		0	Unit	0	0	Unit	1,00
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket		0	Paket	1	1	Paket	1,00
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		0	Dokumen	1	1	Dokumen	1,00
7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	0	2	Dokumen	2,00
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	50	Orang	50	Orang	50	Orang	50	Orang	100%	50	Orang	0	100	Orang	2,00
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang		0	Orang	0	0	Orang	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan operasional Pelayanan Administrasi dan Umum Kantor*	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100 Persen	0	Persen	-
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	100%	5	Paket	5	15	Paket	3,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	100%	10	Paket	10	30	Paket	3,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2026			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	100%	5	Paket	5	15	Paket	3,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	100%	5	Paket	5	15	Paket	3,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	100%	5	Paket	5	15	Paket	3,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	0 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	Dokumen		0 Dokumen	Dokumen	0	0	Dokumen	-
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	0	2	Laporan	2,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	0	2	Laporan	2,00
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		0	Dokumen	0	0	Dokumen	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		0	Dokumen	0	0	Dokumen	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2026			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen		0	Persen	0	0	Persen	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit		0	Unit	0	0	Unit	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran*	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100		Persen	-
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	3	Laporan	3,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	3	Laporan	3,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	3	Laporan	3,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100		Persen	-
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	9	Unit	9	Unit	9	Unit	9	Unit	100%	9	Unit	9	27	Unit	3,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	100%	5	Unit	5	15	Unit	3,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2026			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	1	3	Unit	3,00
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	1	3	Unit	3,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75	Poin	81,75	Poin	81,75	Poin	81,75	Poin	100%	81,75	Poin	0	0	Poin	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	0	0	Persen	-
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	0	2	Laporan	2,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	0	2	Dokumen	2,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan*	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen			Persen	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2026			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	0	2	Dokumen	2,00
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	0	2	Laporan	2,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	0	2	Laporan	2,00
											#DIV/0!						
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Prosentase pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	0		Persen	-
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	3	Dokumen	3,00
															0		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Prosentase Urusan Pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan*	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100 Persen		Persen	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	3	Laporan	3,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2026			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,25	Poin	81,25	Poin	81,500	Poin	81,75	Poin	100%	82,00	Poin	0	163	Poin	2,01
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Prosentase Capaian keberhasilan peningkatan pemberdayaan desa*	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	0	200	Persen	2,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	4	Lembaga Kemasyarakatan	4	Lembaga Kemasyarakatan	4	Lembaga Kemasyarakatan	4	Lembaga Kemasyarakatan	100%	4	Lembaga Kemasyarakatan	4	12	Lembaga Kemasyarakatan	3,00
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	3	Dokumen	3,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	3	Laporan	3,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase capaian Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi*	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	0	200	Persen	2,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2026			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	1	Lembaga Kemasyarakatan	1	Lembaga Kemasyarakatan	1	Lembaga Kemasyarakatan	1	Lembaga Kemasyarakatan	100%	1	Lembaga Kemasyarakatan	1	3	Lembaga Kemasyarakatan	3,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	3	Laporan	3,00
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	3	Laporan	3,00
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase Lcapaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen		0	Persen		0	Persen	
7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga		0	Keluarga	0	0	Keluarga	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga*	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga		0	Keluarga	0	0	Keluarga	
7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri*	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga		0	Keluarga	0	0	Keluarga	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2026			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah*	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga		0	Keluarga	0	0	Keluarga	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup*	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga		0	Keluarga	0	0	Keluarga	
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas*	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga		0	Keluarga	0	0	Keluarga	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	0		Persen	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	0		Persen	-
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	3	Laporan	3,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	3	Laporan	3,00
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	0	200	Persen	2,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2026			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	3	Laporan	3,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,5	Poin	81,5	Poin	81,5	Poin	81,5	Poin	100%	81,5	Poin	0	163	Poin	2,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	0	200	Persen	2,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	50	Orang	50	Orang	50	Orang	50	Orang	100%	50	Orang	50	150	Orang	3,00
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	50	Orang	50	Orang	50	Orang	50	Orang	100%	50	Orang	0	100	Orang	2,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	50	Orang	50	Orang	50	Orang	50	Orang	100%	50	Orang	0	100	Orang	2,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2026			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	3	Dokumen	3,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa cepat berkembang / Persentase desa yang dibina dan diawasi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	0 %	200	Persen	2,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Prosentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa*	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	0	200	Persen	2,00
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	0	2	Dokumen	2,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	3	Dokumen	3,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0%	1	Dokumen	0	2	Dokumen	2,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	0	2	Dokumen	2,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2026			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	0	2	Dokumen	2,00
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa*	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan*	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	#DIV/0!	0	Laporan	0	0	Laporan	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Soreang

Kecamatan Soreang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Adapun rincian tugas pokok Kecamatan Soreang yaitu memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Soreang.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan Soreang dituntut untuk melaksanakan fungsi yang sekaligus menjadi pelayanan perangkat daerah kewilayahan yaitu:

a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasikan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;

a. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;

a. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

a. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

Selain 4 (empat) fungsi tersebut, Kecamatan Soreang melaksanakan pelimpahan kewenangan dari Bupati Bandung untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan Soreang. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.862-TAPEM/2023 tentang Ranhir Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor ; 137.1/Kep.769-TAPEM/2023 Pelimpahan Sebagian Kewenagan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan.

Tabel 2.6
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan
dari Bupati Kepada Camat

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
STATISTIK	Fasilitasi	Fasilitasi pemberian dukungan penyelenggaraan survey antar sensus kecamatan
SOSIAL	Fasilitasi	Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan bagi anak terlantar
		Memfasilitasi pendataan dan pemantauan keberdaan anak terlantar
		Memfasilitasi penyuluhan sosial dan pencegahan anak terlantar
	Koordinasi	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bagi wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan / traficking dan keluarga migran
	Rekomendasi	Memberikan rekomendasi kepada Organisasi Sosial / Panti Sosial yang berada di Desa / Kelurahan dalam hal pendaftaran baru / ulang
PERTANIAN	Fasilitasi	Fasilitasi pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di Kecamatan
	Koordinasi	Koordinasi pencegahan penyakit menular di Kecamatan
	Penyelenggaraan	Identifikasi cadangan pangan dan makanan pokok masyarakat tingkat Kecamatan
PERTANAHAN	Fasilitasi	Fasilitasi penetapan tanah ulayat
		Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
		Fasilitasi perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten di Kecamatan
	Koordinasi	Koordiinasi penyelesaian masalah tanah kosong
		Koordinasi aspek sosial kemasyarakatan dalam proses izin lokasi
		Koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan
		Koordinasi penyelesaian masalah tanah ulayat melalui musyawarah di Kecamatan
	Pengendalian	Monitoring terhadap pelaksanaan izin lokasi
PERTAMBANGAN	Fasilitasi	Fasilitasi pengembangan peran serta masyarakat dalam konservasi air bawah tanah
		Fasilitasi pengendalian pengelolaan air bawah tanah dan konservasi air bawah tanah sesuai dengan kebijakan daerah
PERPUSTAKAAN	Fasilitasi	Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di desa / kelurahan / pontren
PERINDUSTRIAN	Fasilitasi	Fasilitas pengembangan usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
PERHUBUNGAN	Koordinasi	Perencanaan pemasangan, pemeluharaan kebersihan, serta pemantauan keamanan aset perlengkapan jalan di Desa
PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Koordinasi	Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah skala Kecamatan
	Pengendalian	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Desa dan antara Kecamatan/Desa dengan swasta dalam skala Kabupaten
		Pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan daerah skala kecamatan dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa serta penyusunan perumusan DSP Kecamatan
	Penyelenggaraan	Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kecamatan
		Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daera skala Kecamatan
PENDIDIKAN	Fasilitasi	Memfasilitasi pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
		Memfasilitasi pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar
		Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan
		Memfasilitasi perencanaan, penetapan, dan pendirian dan penutupan TK, SD, SMP serta Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
	Koordinasi	Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan TK/SD dan SMP
	Pengendalian	Pengenalan dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini
	Rekomendasi	Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD, dan SMP
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Koordinasi	Koordinasi dan fasilitasi kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender
		Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, serta perempuan di tingkat Kecamatan
		Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak
	Penyelenggaraan	Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) tingkat Kecamatan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Fasilitasi	Fasilitasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes), Laporan Kerja Pertanggungjawaban

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
		(LKPJ) Desa, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (ILLPDes)
		Fasilitasi pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan ke Desa
		Fasilitasi pendataan profil Desa
		Fasilitasi pengawasan dan penanggulangan masalah-masalah penyelenggaraan pembangunan Desa
		Fasilitasi pengembangan BUMDES
		Fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin
		Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat
		Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat
		Memfasilitasi pengusulan mutasi, rotasi perangkat desa di Kecamatan
		Memfasilitasi pengusulan penghargaan untuk perangkat desa di Kecamatan
	Koordinasi	Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
		Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat budaya
		Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG)
		Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan
		Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan
		Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan
		Koordunasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan
		Mengkoordinasikan terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, peningkatan perekonomian dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah Kecamatan
	Pembinaan	Pembinaan dan supervisi pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
		Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
		Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya
		Supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG)
	Pembinaan dan Pengawasan	Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
		Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
		Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa
		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Peundang-Undangan
		Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
		Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
		Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya
	Penetapan	Cuti Kepala Desa
		Pengangkatan dan Pemberhentian BPD
	Pengawasan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan masyarakat di Kecamatan
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan lembaga adat dan budaya
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan
		Monitoring, evaluasi serta pelaporan dan pengolahan data profil desa dan kelurahan
		Monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan
	Penyelenggaraan	Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan
		Penyelenggaraan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
		Penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian pejabat Kepala Desa
		Penyelenggaraan pengesahan, pelantikan, dan pengambilan sumpah keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
		Penyelenggaraan pengesahan, pelantikan, dan pengambilan sumpah Kepala Desa hasil pemilihan
		Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat
	Rekomendasi	Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi pencegahan bencana
		Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
		Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemebentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan
		Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan
		Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar Desa
		Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan di Desa
		Memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan pencairan keuangan desa
		Memberikan rekomendasi perangkat desa
PEKERJAAN UMUM	Fasilitasi	Fasilitasi perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten di wilayah Kecamatan
	Koordinasi	Koordinasi penanganan irigasi antar Kecamatan dalam kegiatan pengairan
		Mengkoordinasikan penanganan bencana alam tingkat kecamatan
		Mengkoordinasikan penanganan jaringan irigasi dalam wilayah Kecamatan
	Rekomendasi	Merekomendasikan pembentukan kelembagaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)
PARIWISATA	Fasilitasi	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya pariwisata
		Fasilitasi pelaksanaan pasanggiri mojang jajaka tingkat Kecamtan
		Fasilitasi pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata
		Fasilitasi penyelenggaraan promosi pariwisata skala Kecamatan
		Fasilitasi penyelenggaraan widya wisata skala kecamatan serta mengirim dan menerima peserta group widya wisata
		Fasilitasi sapta pesona, promosi dan sosialisasi potensi Daya Tarik Wisata (DTW)

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
	Pembinaan	Pemberdayaan masyarakat pelaku jasa usaha pariwisata
LINGKUNGAN HIDUP	Fasilitasi	Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
		Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
		Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup
	Koordinasi	Koordinasi dan pelaksanaan pelestrasian keanekaragaman hayati
		Koordinasi pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala Kecamatan
		Koordinasi pengawasan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kecamatan
		Koordinasi pengawasan kondisi lahan dan/atau tanah skala kecamatan
		Memantau dan membina masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPST
		Mengarahkan masyarakat dalam hal pengangkutan sampah dari sumber Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
		Mengkoordinasikan pengelolaan sampah di masyarakat tingkat kecamatan
		Pengadaan lahan dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
		Pengadaan roda sampah dan tempat sampah terpilah
		Penyebaran informasi tentang sampah kepada masyarakat
	Pengumpulan Data dan Informasi	Melaksanakan Inventarisasi kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan skala Kecamatan
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAN	Penyelenggaraan	Penyelenggaraan pencatatan dan pendataan koperasi UMKM di Kecamatan
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Koordinasi	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan forum komunikasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan kelompok komunikasi sosial
		Koordinasi dan fasilitasi sinergitas kelompok / organisasi yang bergerak di bidang informasi sebagai upaya penyelarasan media dengan program pembangunan di Kecamatan
KETAHANAN PANGAN	Fasilitasi	Fasilitasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan tingkat Kecamatan
	Koordinasi	Koordinasi mengidentifikasi kelompok rawan pangan

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
		Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan makanan
		Koordunasi pemantauan terhadap cadangan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan masyarakat
KESEHATAN	Koordinasi	Mengkoordinasikan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah
		Mengkoordinasikan pencegahan gizi buruk
		Mengkoordinasikan upaya penurunan jumlah kematian Ibu, jumlah kematian bayi dan jumlah kematian balita
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Koordinasi	Pengendalian Penyelengaraan pemerintah di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat di bidang fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada
	Pembinaan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat (Bimbingan, pemantauan, dan evaluasi) di Bidang ketahanan Ideologi Negara, Bela Negara, dan memfasilitasi usulan penghargaan kebangsaan
		Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat (Koordinasi, bimbingan, konsultasi) di bidang bina masyarakat, tenaga kerja, dan penanganan konflik sosial
		Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat (koordinasi, konsultasi, pemantauan) dan fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada
		Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat berupa koordinasi di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
		Pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat berupa koordinasi di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
	Pengawasan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Keluarahan, Desa dan Masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, nilai-nilai sejarah dan kebangsaan serta usulan penghargaan.

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
	Pengendalian	Pengendalian penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan, Keluarahan, Desa dan Masyarakat di bidang bina masyarakat, tenaga kerja, dan penanganan konflik sosial
	Penyelenggaraan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara dan usulan penghargaan kebangsaan
		Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Fasilitasi	Fasilitasi pencatatan sipil skala Kecamatan
	Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kecamatan
		Pengendalian penyelenggaraan pencatatan sipil lingkup Kecamatan
	Pengumpulan Data dan Informasi	Pengumpulan data kelahiran kematian tingkat Kecamatan
	Penyelenggaraan	Penyelenggaraan pelaporan pendaftaran penduduk
		Penyelenggaraan sosialisasi bimbingan teknis supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk
	Koordinasi	Koordinasi pelayanan pencatatan sipil lingkup Kecamatan
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Fasilitasi	Fasilitasi aktivitas kepemudaan di Kecamatan
		Fasilitasi Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda di Kecamatan
	Koordinasi	Koordinasi bidang kepemudaan di Kecamatan
	Pembinaan	Pembinaan dan koordinasi secara hirarkis pemerintahan di bidang kepemudaan
		Pembinaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di Kecamatan
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Koordinasi	Koordinasi pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak berupa
		Koordinasi pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi
		Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi Keluarga Berencana (KB) pria dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi
		Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi menular Seksual (IMS)

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
		Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi
		Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan
KEHUTANAN	Koordinasi	Koordinasi inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam wilayah Kecamatan
		Koordinasi pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi. Hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta hutan taman raya
	Rekomendasi	Rekomendasi untuk izin pengelolaan sarang burung walet, lebah madu, dan budidaya jamur
KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan	Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME dan lembaga adat
		Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan budi pekerti bangsa
		Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan skala Kecamatan meliputi
	Rekomendasi	Rekomendasi pemberian penghargaan kepada seniman, budayawan yang telah berjasa kepada negara dan daerah
KEARSIPAN	Penyelenggaraan	Melaksanakan pelaporan arsip dinamis aktif dan inaktif setiap triwulan ke Kabupaten

Kecamatan Soreang pada periode Renstra Ranhir 2021 – 2026 melaksanakan 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama, 1 (Satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) Indikator sasaran strategis. IKU ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja pemerintahan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan untuk acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun target kinerja dalam Renja tahunan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung. Selanjutnya sebagai perwujudan transparansi kinerja Kecamatan Soreang telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan antara Camat Soreang dengan Bupati Bandung. Pencapaian Kinerja

Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Soreang tersaji dalam tabel berikut ini

Tabel 2.7 TC-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Soreang
Kabupaten Bandung

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Ranhir Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks kepuasan masyarakat			81	81,25	81,50	81,75	83,03	98,25	98,70	98,75	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Soreang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Adapun rincian tugas pokok Kecamatan Soreang yaitu memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Soreang.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kecamatan Soreang dituntut untuk melaksanakan perencanaan kinerja yang efektif serta memastikan pencapaian tujuan Kecamatan Soreang melalui proses perencanaan serta monitoring dan evaluasi. Pada tabel T-C.30 telah dijelaskan pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah namun perlu digarisbawahi terdapat hal-hal kritis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang ditargetkan, yaitu sebagai berikut

2.3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Soreang Tahun 2024 sebesar 80,60 Poin Apabila

dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 77,70 Poin, terjadi peningkatan atau tumbuh sebesar 1.14 persen

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja terhadap implementasi SAKIP Kecamatan Soreang dengan rincian sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

- Penyebab keberhasilan perencanaan kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen, yaitu
  a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia,
  a. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)
  a. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- Penyebab kegagalan perencanaan kinerja, karena masih terdapat kelemahan yaitu
  a. Dokumen perencanaan kinerja (Renstra Ranhir dan Renja) tidak / belum dipublikasikan tepat waktu,
  a. Rencana aksi kinerja belum dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja belum sepenuhnya dipantau secara berkala.
- Solusi yang telah dilakukan yaitu
  a. Dokumen perencanaan kinerja (Renstra Ranhir dan Renja) telah dipublikasikan tepat waktu,
  a. Dokumen perencanaan kinerja harus ditetapkan dengan keputusan Bupati Bandung.
  a. Pemantauan atas capaian Rencana Aksi secara berkala telah berisi hambatan/alasan bila ada keselarasan antara target dan capaian, solusi/saran perbaikan.

B. Pengukuran Kinerja

- ❖ Penyebab keberhasilan pengukuran kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen, yaitu
  a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan,
  a. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan,
  a. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien,
- ❖ Penyebab kegagalan pengukuran kinerja karena masih terdapat kelemahan yaitu
  a. Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja,
  a. Terdapat Definisi Operasional atas kinerja, namun cara mengukur indikator kinerja belum jelas.
  a. Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja yang diharapkan
  a. Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
  a. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja
  a. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
- ❖ Solusi yang telah dilakukan yaitu
  a. Membuat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja,
  a. Pada Definisi Operasional atas kinerja, telah dibuat formulasi penghitungan cara mengukur indikator kinerja dengan jelas.
  a. Data kinerja yang dikumpulkan dari Kasi-kasi, Kasubag dan fungsional telah dilampirkan sebagai pendukung Laporan triwulan yang dibuat.
  a. Pengumpulan data kinerja agar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

a. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
a. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.

A. Pelaporan Kinerja

❖ Penyebab keberhasilan pelaporan kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen, yaitu
a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja,
a. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya,
a. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya,

❖ Penyebab kegagalan pelaporan kinerja karena masih terdapat kelemahan yang meliputi:
a. Dokumen Laporan Kinerja belum direviu (belum ada cheklis reviu berjenjang),
a. Dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan.
a. Dokumen Laporan Kinerja tidak menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya,

❖ Solusi yang telah dilakukan yaitu:

a. Dokumen Laporan Kinerja telah direviu secara berjenjang dibuktikan dengan form cheklis reviu berjenjang,
a. Dokumen Laporan Kinerja (LKIP) 2023 telah segera dipublikasikan melaiui bandungkab.go.id.
a. Dokumen Laporan Kinerja untuk tahun 2023 telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya,

B. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- ❖ Penyebab keberhasilan evaluasi akuntabilitas kinerja internal meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen, yaitu
  a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan,
  a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.
  a. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja,
- ❖ Penyebab kegagalan evaluasi internal pencapaian kinerja program organisasi karena masih terdapat kelemahan yaitu
  a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berjenjang,
  a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
  a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi),
  a. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal belum sepenuhnya ditindaklanjuti,
- ❖ Solusi yang telah dilakukan yaitu
  a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah,
  a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Internal di Lingkungan Kecamatan Soreang.
  a. Melaksanakan koodinasi dengan Tim SAKIP Pemerintah Kabupaten Bandung terkait menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi),
  a. menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya,

2.3.2 Persentase BMD dalam kondisi baik

Realisasi Persentase BMD dalam kondisi baik Kecamatan Soreang Tahun 2024 sebesar 98,50% Apabila dibandingkan dengan

realisasi Tahun 2024 sebesar 98,50%, terjadi peningkatan atau tumbuh sebesar 0.5 persen

Meskipun realisasi persentase BMD dalam kondisi baik pada tahun 2024 telah tercapai, Kecamatan Soreang tetap berkomitmen memegang prinisip akuntabilitas dalam seluruh pelaporan sebagai wujud implementasi transparansi informasi sebagai sarana evaluasi untuk perbaikan kedepannya. Sebagai upaya perbaikan berkelanjutan, pada tahun 2024 Pemerintah Kecamatan Soreang telah melaksanakan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan persentase BMD dalam kondisi baik. Langkah-langkah tersebut yaitu:

1. Menyelesaikan penertiban aset / BMD agar prosedur penghapusan barang dengan kondisi rusak secara bertahap dapat ditempuh. Proses ini akan selesai tahun 2024 yang diakhiri dengan sensus BMD secara keseluruhan.
2. Melaksanakan sensus BMD secara keseluruhan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pendataan aset sehingga pembenahan aset dapat terlaksana, dan juga output dari sensus BMD tersebut digunakan sebagai acuan dasar untuk proses rekonsilisasi aset daerah.
3. Pembentukan tim khusus untuk penyelesaian tertib administrasi dan penggunaan BMD dan penyelesaian reklasifikasi barang.

2.3.3 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Soreang Tahun 2024 sebesar 98.75 Poin Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 98.25 Poin, terjadi peningkatan atau tumbuh sebesar 0,25 persen

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada aplikasi e-skm, didapat data sebagai berikut:

a. Pelayanan Pembuatan e-KTP

Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Pembuatan e-KTP di Kecamatan Soreang Tahun 2023 adalah 82,7 (Baik) pada 9 unsur pelayanan, namun unsur yang harus mendapat

perhatian dan perbaikan adalah unsur *Waktu Penyelesaian, Prosedur, Perilaku Pelaksana.*

b. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK)

Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2024 adalah 86,01 (Baik) pada 9 unsur pelayanan, namun terdapat unsur yang harus mendapat perhatian dan perbaikan adalah unsur *Waktu Penyelesaian, Perilaku Pelaksana, Prosedur*.

c. Pelayanan Pembuatan SKTM

Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Pembuatan SKTM Tahun 2024 adalah 86,24 (Baik) pada 9 unsur pelayanan, namun terdapat unsur yang harus mendapat perhatian atau perbaikan adalah unsur *Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana, Prosedur*.

d. Pelayanan Pembuatan Surat Pindah Datang

Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Pembuatan Surat Pindah Datang Tahun 2024 adalah 92,32 (Sangat Baik) pada 9 unsur pelayanan, namun terdapat unsur yang harus mendapat perhatian atau perbaikan adalah unsur *Prosedur, Waktu Pelayanan dan Perilaku Pelaksana.*

e. Pelayanan Pembuatan Keterangan Ahli Waris

Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Pembuatan Keterangan Ahli Waris Tahun 2022 adalah 85,42 (Baik) pada 9 unsur pelayanan, namun terdapat unsur yang harus mendapat perhatian atau perbaikan adalah unsur *Perilaku Pelaksana, Waktu Pelayanan dan Kompetensi Pelaksana.*

f. Pelayanan Surat Lainnya

Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Surat Lainnya Tahun 2023 adalah 100 (Sangat Baik) pada 9 unsur pelayanan, namun terdapat unsur yang harus mendapat perhatian atau perbaikan adalah unsur *Perilaku Pelaksana, Prosedur dan Waktu Pelayanan.*

g. Pelayanan Pembuatan Akta Tanah

Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Rekomendasi PembuatanAktaJual Beli adalah 79.17 (Baik). Adapun dari 9 unsur pelayanan, unsur yangharusmendapat perhatian adalah

unsur Sarana dan *Prasarana, Persyaratan, Sistem,Mekanisme* dan Prosedur.

h. Pelayanan Rekomendasi Bantuan Dana/Hibah

Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Rekomendasi PencairanBantuanKeuangan Desa Tahun 2023 adalah 80,56 (Baik). Adapun dari 9 unsur pelayanan,unsur yang harus mendapat perhatian adalah unsur *Sarana* dan *Prasarana,Persyaratan, Sistem, Mekanisme* dan *Prosedur*.

i. Pelayanan Surat Keterangan Lainya

Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Rekomendasi PencairanBantuanKeuangan Desa Tahun 2023 adalah 90,68 (Baik). Adapun dari 9 unsur pelayanan,unsur yang harus mendapat perhatian adalah unsur *Sarana* dan *Prasarana,Persyaratan, Sistem, Mekanisme* dan *Prosedur*.

❖ Solusi yang telah dilakukan yaitu terus melakukan perbaikan berkelanjutan dari semua unsur pelayanan, diantaranya

1. Penyesuaian SOP Pelayanan
2. Efektifitas kinerja pelayanan
3. Coaching dan Mentoring Sumber Daya Manusia
4. Peningkatan kualitas dan efektifitas Sumber Daya Manusia dengan cara sosialisasi dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh internal Kecamatan dan Instansi Vertikal

2.3.4 Persentase Desa yang Beradministrasi baik

Realisasi Persentase Desa Beradministrasi baik Kecamatan Soreang Tahun 2024 sebesar 80% Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 70 %, dikarenakan nilai tersebut baru ditetapkan pada tahun 2023

Meskipun realisasi Persentase Desa yang Beradministrasi baik pada tahun 2024 telah tercapai, Kecamatan Soreang tetap berkomitmen memegang prinisip berAkhak sebagai sarana evaluasi untuk perbaikan kedepannya. Sebagai upaya perbaikan berkelanjutan, pada tahun 2024 Pemerintah Kecamatan Soreang telah melaksanakan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan Persentase Desa yang Beradministrasi baik, Penilaian terhadap seluruh aspek Administrasi Desa

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Soreang, maka ditentukan isu – isu penting yaitu:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap berdasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan Non Pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
2. Optimalisasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh – sungguh memperhatikan Company/Corporate Social Responsibility (CSR), maka Kecamatan harus benar benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pelayanan Prima. Kecamatan Soreang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bandung yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar – benar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta tatanan atau aturan yang berlaku. Dan penyelenggaraan prima tersebut diperlukan Standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat baik melalui kegiatan yang ada di tingkat desa maupun kegiatan sosialisasi kependudukan yang secara intens dilaksanakan oleh Kecamatan pada tiap tahunnya. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan masyarakat dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.

4. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
5. Fasilitasi Pemanfaatan posisi dan potensi sebagai wilayah Pariwisata, Perdagangan dan Pendidikan yang dimiliki oleh Kecamatan Soreang harus sebaik mungkin dapat dimanfaatkan guna mendorong kemajuan kesejahteraan masyarakatnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Definisi RKPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja (Renja)dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja (Renja)Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan alasan sebagai berikut:

1. Arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
2. Acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Isu – Isu Strategis
Dari Analisa isu trategis masih terdapat permasalah isu pada

1. Penguatan fungsi wilayah
2. Peningkatan kualitas SDM.
3. Penanganan Stunting, Kemiskinan Ekstrem
4. Peningkatan Ekonimo Kewilayahan.

Dari analisis tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk menyelesaikan isu strategis yang diharapkan dapat menjadi basis perencanaan yang mendukung program mandatori kewilayahan pada tahun 2026 yaitu:

5. Penguatan fungsi wilayah sebagai wilayah penompang pertumbuhan perkembangan Pembangunan ibu kota Kabupaten Bandung.
6. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan layanan Pendidikan (terutama program penyetaraan Pendidikan) dan Pelatihan Ketenagakerjaan.
7. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan layanan kesehatan, layanan KB dan pengendalian penduduk.
8. Peningkatan kolaborasi unsur Pentahelix untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem
9. Pengembangan kegiatan budidaya pertanian/peternakan dan kegiatan pariwisata secara bijak.
10. Peningkatan infrastruktur wilayah sebagai pendukung pengembangan sektor wisata dan sektor pertanian.
11. Peningkatan jaringan kerjasama usaha pelaku ekonomi melalui kemitraan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi serta pelaku ekonomi lainnya.
12. Kolaborasi dengan Pentahelix untuk penanganan penurunan miskin ekstrem, stunting dan wilayah blank spot.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Kecamatan Soreang sesuai tugas dan fungsinya merencanakan pelaksanaaan program kegiatan diantaranya

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebagai upaya dalam Penguatan fungsi wilayah untuk pelaksanaan
   a. Forum Koordinasi Kecamatan Sehat (FKKS)

b. Fasilitasi kegiatan-kegiatan percepatan penurunan stunting
c. Fasilitasi pemberdayaan UMKM dan Koperasi

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagai upaya Kecamatan dalam beberapa hal, diantaranya
   a. Upaya mengatasi masalah sarana dan prasarana khususnya dalam hal peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dalam sarana dan prasarana pelayanan umum sehingga dapat melaksanakan rekomendasi tersebut.
3. Kecamatan Soreang merencanakan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat diantaranya
   a. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan dan fasilitasi perencanaan, penetapan, dan pendirian dan penutupan TK, SD, SMP serta Pendidikan Luar Sekolah (PLS) sebagai upaya peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan terutama program penyetaraan pendidikan.
   b. Fasilitasi peningkatan layanan kesehatan, layanan KB dan pengendalian penduduk
   c. Fasilitasi dan koordinasi sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrem sebagaimana Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Bidang Sosial
   d. Fasilitasi Pengembangan kegiatan budidaya pertanian/peternakan dan kegiatan pariwisata secara bijak sebagaimana Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Bidang Pertanian dan Pariwisata
   e. Kecamatan Soreang sebagaimana termuat pada pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Bidang Komunikasi Dan Informatika merencanakan dengan Instansi Vertikal sebagai upaya penyelesaian wilayah blank spot di Kecamatan Soreang
4. Kecamatan Soreang pada Program Ketentraman dan Ketertiban sebagai upaya dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, dimana dalam

peraturan tersebut menerangkan bahwa tahapan, kelengkapan dan bantuan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diantaranya Deteksi Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, Pengawalan, Penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Adapun rumusan terhadap rencana program dan kegiatan tahun 2026 sesuai dengan hasil analisis kebutuhan organisasi, dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel. TC 31
Revieu Terhadap Rancangan Ranhir RKPD Tahun 2026
Kabupaten Bandung

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Soreang

Rancangan Ranhir Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
KECAMATAN	Kecamatan Soreang				KECAMATAN	Kecamatan Soreang	KECAMATAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Soreang	Nilai SAKIP	76,25 Point	4.436.514.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Soreang	Nilai SAKIP	78,86 Point	5.398.402.520,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	15.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	18.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000,00
ordinasi dan Penyusunan Dokumen Ranhir RKA-SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Ranhir RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Ranhir RKA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Ranhir RKA-SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Ranhir RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Ranhir RKA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00

Rancangan Ranhir Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Koordinasi dan Penyusunan Ranhir DPA-SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Ranhir DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Ranhir DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Ranhir DPA-SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Ranhir DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Ranhir DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000,00
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	- Dokumen	-	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	- Dokumen	-
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Soreang	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	- Data	-	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Soreang	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	- Data	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 Persen	3.975.314.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 Persen	4.843.982.520,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Soreang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/Bulan	3.973.314.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Soreang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/ Bulan	4.839.982.520,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1.000.000,00

Rancangan Ranhir Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	- Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamata n Soreang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.000.000,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Dokumen		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamata n Soreang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Dokumen	1.000.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	100 Persen	2.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamata n Soreang	Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	100 Persen	15.000.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamata n Soreang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Laporan	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamata n Soreang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Laporan	1.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	100 Persen	18.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamata n Soreang	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	100 Persen	5.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Soreang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	- Unit	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamata n Soreang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	- Unit	-
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Soreang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamata n Soreang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	3.000.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	0 Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kecamata n Soreang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	0 Dokumen	-

Rancangan Ranhir Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian					Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Soreang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- orang	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Soreang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- orang	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	Kecamatan Soreang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	- orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	Kecamatan Soreang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	orang	10.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Prosentase Ketersediaan Operasional Perkantoran	100 Persen	87.420.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Prosentase Ketersediaan Operasional Perkantoran	100 Persen	107.420.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Soreang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Soreang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Soreang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	34.920.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Soreang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	34.920.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Soreang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Soreang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Soreang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Paket	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Soreang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.500.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Soreang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Soreang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.000.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000,00

Rancangan Ranhir Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	20.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	40.000.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Dokumen	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Dokumen	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Soreang	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persen	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Soreang	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Soreang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Soreang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit	1.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Soreang	Prosentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	228.780.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Soreang	Prosentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	277.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	36.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	45.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	190.780.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	230.000.000,00

Rancangan Ranhir Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Soreang	Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik	98,03%	110.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Soreang	Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik	98,03%	130.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	60.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	80.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Soreang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Soreang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Soreang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	- Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Soreang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Soreang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Soreang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	22.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Soreang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81,50 Point	65.660.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Soreang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	86,93 Point	510.000.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Soreang	Prosentase Kegiatan Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang terlaksanakan	100 Persen	14.000.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Soreang	Prosentase Kegiatan Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang terlaksanakan	100 Persen	12.500.000,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1Laporan	3.000.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2.500.000,00

Rancangan Ranhir Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	11.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	10.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Soreang	Prosentase Masyarakat yang mendapat pelayanan prima di kecamatan	100 Prosen	6.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Soreang	Prosentase Masyarakat yang mendapat pelayanan prima di kecamatan	100 Prosen	7.55.000,00
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	- Dokumen	-	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	2.500.000,00
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.000.000,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.500.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.500.000,00
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Soreang	Prosentase pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	20.000.000,00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Soreang	Prosentase pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	40.000.000,00
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	20.000.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	40.000.000,00

Rancangan Ranhir Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Soreang	Prosentase Urusan Pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan	100%	25.660.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Soreang	Prosentase Urusan Pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan	100%	450.000.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7 Laporan	25.660.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7 Laporan	450.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Soreang	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	86,93	22.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Soreang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	86,93	160.000.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Soreang	Prosentase Capaian keberhasilan peningkatan pemberdayaan desa		6.000.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Soreang	Prosentase Capaian keberhasilan peningkatan pemberdayaan desa		88.000.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	2.000.000,00	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan emberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	3.000.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Dokumen	2.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Dokumen	80.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Soreang	Prosentase lembaga dan usaha masyarakat yang dibina	100%	16.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Soreang	Prosentase lembaga dan usaha masyarakat yang dibina	100%	40.000.000,00

Rancangan Ranhir Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00
Penyediaan Sarana dan Prasaranan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasaranan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	1 Unit	-
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	2.000.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	5.000.000,00
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	2.000.000,00	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	5.000.000,00
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Soreang	Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-%	-	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Soreang	Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	32.000.000,00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kecamatan Soreang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	- Keluarga	-	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	10 Keluarga	5.000.000,00
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Soreang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	- Keluarga	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10 Keluarga	5.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan	Kecamatan Soreang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam	- Keluarga	-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan	Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam	10 Keluarga	5.000.000,00

Rancangan Ranhir Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri			Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kecamatan Soreang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	- Keluarga	-	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	10 Keluarga	5.000.000,00
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Soreang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	- Keluarga	-	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10 Keluarga	7.000.000,00
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Soreang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	- Keluarga	-	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	10 Keluarga	5.000.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Soreang	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	11.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Soreang	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	60.000.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Soreang	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	5.000.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Soreang	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	45.000.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	1 Laporan	2.500.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	1 Laporan	15.000.000,00

Rancangan Ranhir Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Vertikal di Wilayah Kecamatan					Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1Laporan	2.500.000,00	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1Laporan	30.000.000,00
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Soreang	Prosentase aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan	100%	6.000.000,00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Soreang	Prosentase aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan	100%	15.000.000,00
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	6.000.000,00	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	15.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Soreang	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	22.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Soreang	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	1,00	90.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Soreang	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	22.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Soreang	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	90.000.000,00
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Kecamatan Soreang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	- Orang	-	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Kecamatan Soreang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	50 Orang	10.000.000,00

Rancangan Ranhir Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Soreang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	7.000.000,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Soreang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	20.000.000,00
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Soreang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	40 Orang	3.000.000,00	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Soreang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	50 Orang	20.000.000,00
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1Laporan	2.000.000,00	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	- Laporan	-
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	10.000.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	40.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Soreang	Prosentase Desa yang dibina dan Diawasi	100%	88.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Soreang	Prosentase Desa yang dibina dan Diawasi	100%	110.000.000,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	Kecamatan Soreang	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	88.000.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Kecamatan Soreang	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	110.000.000,00

Rancangan Ranhir Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Pengawasan Pemerintahan Desa				
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0 Dokumen		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0 Dokumen	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	30.000.000,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	30.000.000,00
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	5.000.000,00
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	35.000.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	40.000.000,00
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	- Dokumen	-	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	5.000.000,00
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen	3.000.000,00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	- Dokumen	-

Rancangan Ranhir Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	2.500.000,00	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	- Dokumen	-
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.500.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	- Laporan	
Jumlah Total				4.645.174.000,00					6.323.402.520,00

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja)(Renja) Kecamatan Soreang Tahun 2026 merupakan Rencana Kerja (Renja)tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra Ranhir) Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja (Renja)(RENJA) Kecamatan Soreang Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Ranhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja (Renja)Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja (Renja)Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Soreang dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kecamatan Soreang telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan pada Tahun 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026. Dan berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbang tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

abel 2.9 T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Bandung

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Soreang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			NIHIL		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SOREANG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 terdapat beberapa isu strategis, salah satunya adalah rendahnya kualitasi implementasi dan belum optimalnya kualitas dan kuantitas partisipasi dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah pusat mencanangkan salah satu agenda pembangunan yaitu *Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik* untuk menyelesaikan isu strategis tersebut.

Kabupaten Bandung dalam mendukung agenda pembangunan nasional tersebut mencanangkan misi *Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.* Pemerintah adalah salah satu aktor utama dalam pembangunan. Konsep tata kelola pemerintahan dengan prinsip *good governance* sudah sering digalakkan baik dalam skala pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam satu dekade terakhir. Dalam melengkapi konsep *good governance* yang masuh terus diupayakan, penerapan konsep *dynamic governance* dirasa penting untuk diadakan. Konsep tata pemerintahan yang dinamis adalah mencoba menciptakan pemerintahan yang selalu adaptif terhadap dinamika Ranhir dan tantangan yang selalu berubah setiap waktunya.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dinamis maka perlu adanya dorongan beberapa faktor yaitu meningkatnya kualitas e-government melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik, dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, pemerintah daerah perlu menciptakan stabilitas lingkungan bermasyarakat yang religius dan kondusif dengan cara meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dorongan-dorongan terhadap beberapa faktor tersebut merupakan tugas dan fungsi kewilayahan yang dilaksanakan Kecamatan Soreang dalam lingkup wilayahnya.

Peranan Kecamatan sangat strategis dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan penyelengaraan fungsi sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan, dengan menitikberatkan pada isu sentral diantaranya

Tabel 3.1
Dukungan Program Program Perangkat Daerah (Kecamatan) yang Mendukung Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Prioritas Nasional

Program Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Program Kecamatan
PN 3	SDM berkualitas dan berdaya saing	PP1	Reformasi sistem kesehatan daerah	P1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	
PN 1	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas	PP2	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan	P2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	

Program Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Program Kecamatan
	dan berkeadilan		berbasis inovasi			
		PP8	Gerakan membangun desa			
PN 7	Stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik	PP7	Inovasi pelayanan publik dan penataan dearah	P3	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
PN 3	SDM berkualitas dan berdaya saing	PP5	Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan	P4	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global	
PN 4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP9	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara			
PN 6	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan Ranhir iklim	PP6	Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana	P5	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	

Program Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Program Kecamatan
		PP10	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup		dan mengantisipasi risiko Ranhir iklim	
PN 4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP3	Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan	P6	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan	
PN 2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	PP10	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup	P7	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	
PN 5	Infrastruktur untuk ekonomi pelayanan dasar	PP9	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara			
PN 3	SDM berkualitas dan berdaya saing	PP4	Reformasi sistem perlindungan social	P8	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat	
PN 2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	PP11	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	P9	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran untuk mencapai mencapai visi dan misi pemerintah daerah, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah, sehingga tujuan merupakan hal yang

sangat penting dalam perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat arah yang jelas dan terukur serta memberikan parameter terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan kajian-kajian yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 terdapat tantangan-tantangan dalam pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2021-2026 ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Bandung yaitu "*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera.*"

Penjabaran dari visi Kabupaten Bandung 2021-2026 adalah sebagai berikut

Bangkit: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit adalah memberdayakan masyarakat menuju Ranhir sosial ekonomi secara nyata dan bertahap melalui program pembangunan yang dirancang secara sektoral dan regional yang berdampak signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya beli.

Edukatif: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Edukatif, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat dan aparatur memiliki motivasi, semangat, dan etos kerja yang prima atau Bedas di segala bidang untuk kemajuan Kabupaten Bandung.

Dinamis: Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Bandung yang Dinamis, yang dimaksud adalah terselenggaranya kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Bandung yang memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai: (i) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; (ii) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Agamis: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Agamis, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang

masyarakatnya dan aparaturnya bersih dan berwibawa berakhlak mulia berlandaskan nilaI-nilai keagamaan.

Sejahtera: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Sejahtera, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan memadai.

Berdasarkan visi pembangunan yang ada, berikut adalah misi-misi pembangunan yang ada dalam mewujudkan visi pembangunan. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1. Membangkitkan Daya Saing Daerah.
2. Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata
3. Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreativitas dalam bingkai kearifan lokal.
4. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah.

Berdasarkan telahaan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, agar visi dan misi tersebut dapat diwujudkan serta sebagai upaya penyelesaian isu strategis yang telah dirumuskan, maka Kecamatan Soreang menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah berdasarkan pada sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada visi dan misi bupati. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Ranhir Kecamatan Soreang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan.

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Soreang pada periode tahun 2021 – 2026 terperinci dalam gambar dan tabel berikut ini:

Gambar 3.1
Cascading RPJMD terhadap Tujuan dan Sasaran Kecamatan Soreang



Tabel 3.2

Matriks Cascading Misi, Tujuan RPJMD, Sasaran RPJMD dan Tujuan Kecamatan Soreang

No.	MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE
									1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas e-govt melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80,97 Poin	81,00 Poin	81,25 Poin	81,50 Poin	81,75 Poin	85,19 Poin	82.00 Poin

a. Tujuan

Tujuan Kecamatan Soreang pada tahun 2026 dirumuskan dengan memperhatikan Misi 4, yaitu Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan mayarakat yang berlandaskan nilai – nilai keagamaan yang diemban seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung, maka tingkat pencapaiannya dapat dilihat dari

sisi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan itu sendiri. Adapun tujuannya, yaitu:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Adapun Sasaran Renja Kecamatan Soreang Tahun 2026 adalah:

“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan “

Untuk memperjelas kerangka kerja dari tujuan dan sasaran perangkat daerah maka diperlukan penentuan indikator kinerja dari turunan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tabel 3.2 merupakan matriks indikator kinerja dari tujuan dan sasaran beserta turunannya berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Soreang pada Tahun 2026.

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026
Kecamatan Soreang

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi			
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Tersedianya Dokumen Ranhir RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Ranhir RKA-SKPD	Tersusunya Dokumen Ranhir RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Ranhir RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Ranhir RKA SKPD			Jumlah Dokumen Ranhir RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Ranhir RKA-SKPD	
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Tersusunya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
	Tersedianya Dokumen Ranhir DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Ranhir DPA-SKPD	Tersusunya Dokumen Ranhir DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Koordinasi dan Penyusunan Ranhir DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Ranhir DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyusunan Dokumen Ranhir DPA-SKPD				Penyusunan Dokumen Ranhir DPA-SKPD	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Tersedianya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Tersusunya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan			Jumlah Laporan Keuangan Akhir	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Akhir Tahun SKPD			Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tersedianya Dokumen Administrasi BMD yang tepat waktu	Tersusunya Dokumen Administrasi BMD yang tepat waktu	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan		
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Tersedianya dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	Tersusunya dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
					perangkat daerah yang tepat waktu		
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersusunya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersusunya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Tersusunya Laporan Pelaksaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
	Tersedianya Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Tersusunya Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Paket Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Tersedianya dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersusunya dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Tersedianya Mebel	Terlaksananya Penyediaan Mebel	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
	Tersedianya laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunya laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersusunya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam Kondisi Baik		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersusunya Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
						Lainnya yang Dipelihara	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersusunya Laporan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT			
	Tersedianya Dokumen koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunya Dokumen koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersusunya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
						Instansi Vertikal Terkait	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	Tersedianya Dokumen Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Tersusunya Dokumen Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan		
	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
						Minimal diWilayah Kecamatan	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	
	Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tersusunya Dokumen Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Tersusunnya Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
						Prasarana Pelayanan Umum	
	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tersusunya Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan		
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas Tata Kelola pemerintahan desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			
	Tersedianya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersusunya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersusunya Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
						Wilayah Kecamatan	
	Tersedianya Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tersusunya Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Meningkatnya lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi		
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tersusunya Laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tersusunya Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
	Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Jumlah Laporan Fasilitasi PemanfaatanTeknologi Tepat Guna	
	Tersediaanya Dokumen Laporan tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Tersusunya Dokumen Laporan tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			Kecamatan dan Kelurahan		
	Terlaksananya kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Tersediaanya Data kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
	Terlaksananya kegiatan Ketahanan Pangan Keluarga	Tersusunya Laporan kegiatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Tersediaanya Laporan Data Kegiatan Pemberdayaan	Pemberdayaan Masyarakat dalam			Jumlah Keluarga yang Mengikuti	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri			Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Tersediaanya Data Laporan tentang Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	
	Terlaksananya kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Tersedianya Laporan Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kelestarian Lingkungan Hidup	
	Terlaksananya kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Tersediaanya Laporan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum			
	Tersedianya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersusunya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tersusunya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tersusunya Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara RepublikIndonesia	
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah			
	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersusunya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
					Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	
	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
						Lokal,Regional, dan Nasional	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
6	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas Tata Kelola pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi			
	Tersedianya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersusunya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang dibina		
	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tersusunya Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanAset Desa	
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Tersusunya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDesa	

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil. Program dan Kegiatan pada Kecamatan Soreang yang disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung, perencanaan program dan kegiatan ini sesuai alur atau mekanisme perencanaan mulai dari persiapan hingga penetapan skala prioritas. Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Soreang selama satu tahun ke depan tahun 2026, diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kabupaten Bandung.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, ditetapkan beberapa subkegiatan pada tahun 2026, dimana subkegiatan tersebut merupakan bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, Kecamatan Soreang menetapkan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026 yang terdiri dari 6 program, 17 kegiatan, dan 71 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 6.323.402.520,-

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi pemerintah daerah, dalam Rencana Kerja (Renja)Kecamatan Soreang Tahun 2024 direalisasikan melalui program/kegiatan/subkegiatan. Adapun rencana program/kegiatan/sub kegiatan Kecamatan Soreang adalah sebagaimana tercamtum dalam Tabel T-C.33 sebagaimana terlampir di bawah:

Tabel 3.2 T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Soreang Tahun 2026
Dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Bandung

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					KECAMATAN SOREANG					6.734.009.669,00					6.634.809.400,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					6.734.009.669,00					6.634.809.400,00
7	01				KECAMATAN					6.734.009.669,00					6.634.809.400,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	61.05 35	Poin Poin	6.026.421.200,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		61.05 35	Poin Poin	5.934.041.200,00
7	01	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Kecamatan Soreang	82,25	Poin	32.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		82,25	Poin	23.000.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	2	Dokumen	15.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2	Dokumen	15.000.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Soreang	2	Dokumen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2	Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Soreang	2	Dokumen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2	Dokumen	1.000.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Soreang	1	Laporan	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	1.000.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	1	Laporan	10.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	1.000.000,00
7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Soreang	1		1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1		1.000.000,00
7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	1		1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1		1.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Kecamatan Soreang	100	Persen	5.371.451.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	5.371.451.000,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Soreang	21	Orang/bulan	5.367.451.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21	Orang/bulan	5.367.451.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Soreang	1	Laporan	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	1.000.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Soreang	1	Laporan	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	1.000.000,00
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Kecamatan Soreang	100	Persen	2.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	2.000.000,00
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Soreang	1	Laporan	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	1.000.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Kecamatan Soreang	100	Persen	18.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	18.000.000,00
7	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Soreang	1	Unit		DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Unit	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Soreang	1	Paket	3.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Paket	3.000.000,00
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	2.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	2.000.000,00
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Soreang	21	Orang		DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21	Orang	
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Soreang	21	Orang	12.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21	Orang	12.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	100	Persen	156.800.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	87.420.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Soreang	5	Paket	3.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5	Paket	3.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Soreang	10	Paket	100.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10	Paket	34.920.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Soreang	5	Paket	10.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5	Paket	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Soreang	5	Paket	1.500.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5	Paket	1.500.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Soreang	5	Paket	10.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5	Paket	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Soreang	1	Laporan	5.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Soreang	1	Laporan	24.300.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	20.000.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Soreang	100	Persen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	3.000.000,00
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Soreang	0	Unit	-	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	Unit	2.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Soreang	1	Unit	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Unit	1.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Soreang	100	Persen	335.170.200,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	321.170.200,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Soreang	1	Laporan	2.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	2.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Soreang	1	Laporan	50.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	36.000.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Soreang	1	Laporan	283.170.200,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	283.170.200,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Kecamatan Soreang	100	Persen	110.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	108.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Soreang	9	Unit	60.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9	Unit	60.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Soreang	5	Unit	3.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5	Unit	3.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Soreang	1	Unit	25.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Unit	25.000.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Soreang	1	Unit	22.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Unit	20.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	Kecamatan Soreang	100	Persen	292.798.469,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	373.768.200,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan Soreang	100	Persen	8.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	8.000.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Soreang	1	Laporan	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	1.000.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	7.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	7.000.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	Kecamatan Soreang	100	Persen	3.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	3.000.000,00
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	1.000.000,00
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	1	Laporan	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	1.000.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	1	Laporan	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	1.000.000,00
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Soreang	100	Persen	20.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	20.000.000,00
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	20.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	20.000.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum									
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	Kecamatan Soreang	100	Persen	261.798.469,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	342.768.200,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Soreang	1	Laporan	261.798.469,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	342.768.200,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	Kecamatan Soreang	100	Persen	186.090.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	125.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Soreang	100	Persen	119.090.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	58.000.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Soreang	4	Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4	Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	-	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	3.000.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	1	Laporan	111.090.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	50.000.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina	Kecamatan Soreang	100	Persen	40.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	40.000.000,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Soreang	4	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Soreang	1	Laporan	5.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	5.000.000,00
7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Soreang	1	Laporan	5.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	5.000.000,00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Soreang	100	Persen	27.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	27.000.000,00
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	Kecamatan Soreang	10	Keluarga	-	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10	Keluarga	5.000.000,00
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Soreang	10	Keluarga	10.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10	Keluarga	5.000.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kecamatan Soreang	10	Keluarga	5.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10	Keluarga	5.000.000,00
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kecamatan Soreang	10	Keluarga	5.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10	Keluarga	2.000.000,00
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Soreang	10	Keluarga	7.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10	Keluarga	7.000.000,00
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Soreang	10	Keluarga	-	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10	Keluarga	3.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Soreang	100	Persen	61.700.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	55.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Soreang	100	Persen	51.700.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	45.000.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	1	Laporan	15.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	10.000.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Soreang	1	Laporan	36.700.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	35.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Soreang	100	Persen	10.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	10.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Soreang	1	Laporan	10.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	10.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Soreang	100	Persen	63.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	63.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Soreang	100	Persen	63.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	63.000.000,00
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Soreang	50	Orang	10.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50	Orang	3.000.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Negara Kesatuan Republik Indonesia										
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Soreang	50	Orang	10.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50	Orang	10.000.000,00
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Kecamatan Soreang	50	Orang	10.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50	Orang	10.000.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	33.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	40.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	Kecamatan Soreang	100	Persen	104.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	84.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Kecamatan Soreang	100	Persen	104.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	84.000.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	-	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	2.000.000,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	20.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	20.000.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	25.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	19.000.000,00
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	-	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	3.000.000,00
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	2.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	2.000.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	50.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	33.000.000,00
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	5.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	3.000.000,00
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	2.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	1.000.000,00
7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	Laporan	-	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	1.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA (RENJA)DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja (Renja)

Penyusunan Rencana Kerja (Renja)merupakan pengimplementasian konsep perencanaan. Pentingnya perencanaan dan peran yang dimainkannya di dalam keseluruhan proses manajerial organisasi, telah menempatkan perencanaan sebagai faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari organisasi Kecamatan Soreang. Perencanaan merupakan suatu proses yang terus menerus dengan melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi satu tahun kedepan.

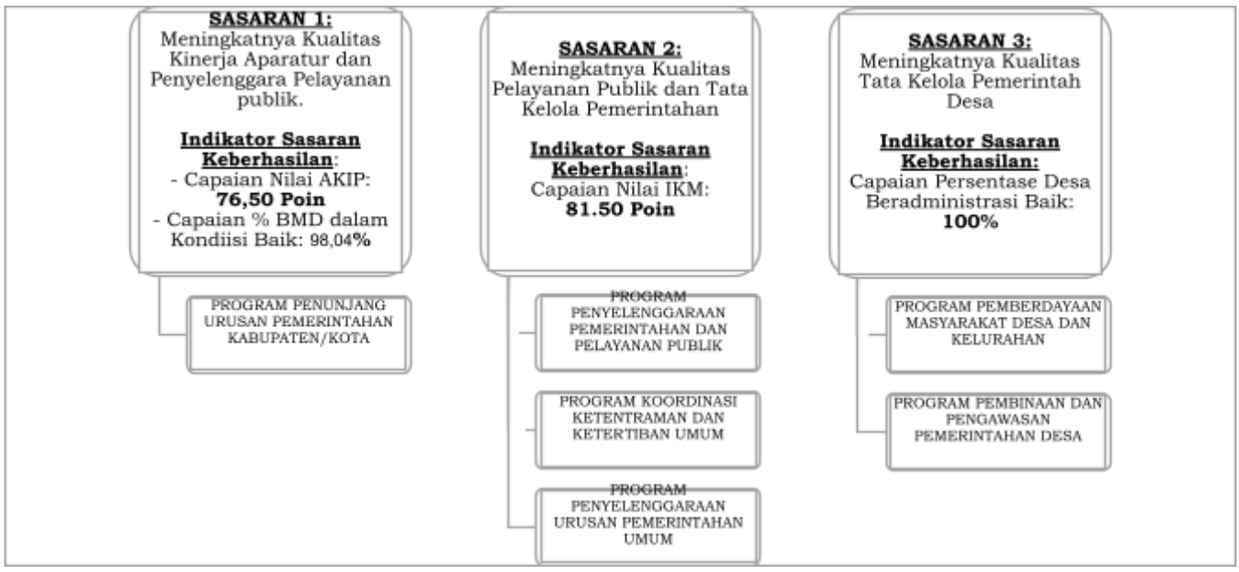
Rencana Kerja (Renja)merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Kerja (Renja)Kecamatan Soreang Tahun 2026 mengacu kepada Rencana Kerja (Renja)Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2026, merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung maupun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Ranhir PD) Tahun 2021-2026.

Berdasarkan analisa kebutuhan, Kecamatan Soreang menetapkan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dalam usaha penyelesaian isu strategis. Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Soreang maka program dan kegiatan direncanakan untuk mendukung urusan kewilayahan yang keberhasilannya diukur dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator Sasaran.

Untuk mencapai sasaran tersebut dibutuhkan rumusan program dan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian sasaran. Sebelum menentukan besaran pagu anggaran yang dibutuhkan perlu ditentukan program apa yang dapat menyelesaikan isu yang berkaitan langsung dengan pelayanan Kecamatan Soreang dengan ukuran keberhasilan Indikator Kinerja Utama yang telah ditentukan. Berikut ini adalah penentuan rencana program yang akan dilaksanakan:

Gambar 4.1

Rencana Program yang Akan Dilaksanakan Tahun 2026



Rencana Kerja (Renja)(Renja) Kecamatan Soreang tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tahun 2026. Rencana Kerja (Renja)Kecamatan Soreang yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Soreang demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan, yang di dalamnya telah memuat Indikator kinerja dipergunakan sebagai tolok ukur pencapaiannya. Rencana Kerja (Renja)Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Ranhir Tahun 2026, sebagai berikut:

1.2 Pendanaan

Tabel 4.1
Ranhir Rencana Kerja (Renja)Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Tahun Anggaran 2026

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					KECAMATAN SOREANG					6.734.009.669,00					6.634.809.400,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					6.734.009.669,00					6.634.809.400,00
7	01				KECAMATAN					6.734.009.669,00					6.634.809.400,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	61.05 35	Poin Poin	6.026.421.200,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		61.05 35	Poin Poin	5.934.041.200,00
7	01	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Kecamatan Soreang	82,25	Poin	32.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		82,25	Poin	23.000.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	2	Dokumen	15.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2	Dokumen	15.000.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Soreang	2	Dokumen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2	Dokumen	1.000.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Soreang	2	Dokumen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2	Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Soreang	1	Laporan	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	1.000.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	1	Laporan	10.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	1.000.000,00
7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Soreang	1		1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1		1.000.000,00
7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	1		1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1		1.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Kecamatan Soreang	100	Persen	5.371.451.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	5.371.451.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Soreang	21	Orang/bulan	5.367.451.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21	Orang/bulan	5.367.451.000,00
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Soreang	1	Laporan	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	1.000.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Soreang	1	Laporan	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	1.000.000,00
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Kecamatan Soreang	100	Persen	2.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	2.000.000,00
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	1.000.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Soreang	1	Laporan	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	1.000.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Kecamatan Soreang	100	Persen	18.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	18.000.000,00
7	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Soreang	1	Unit		DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Unit	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Soreang	1	Paket	3.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Paket	3.000.000,00
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	2.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	2.000.000,00
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Soreang	21	Orang		DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21	Orang	
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Soreang	21	Orang	12.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21	Orang	12.000.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	100	Persen	156.800.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	87.420.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Soreang	5	Paket	3.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5	Paket	3.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Soreang	10	Paket	100.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10	Paket	34.920.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Soreang	5	Paket	10.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5	Paket	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Soreang	5	Paket	1.500.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5	Paket	1.500.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Soreang	5	Paket	10.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5	Paket	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Soreang	1	Laporan	5.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	5.000.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Soreang	1	Laporan	24.300.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	20.000.000,00
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	1.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Soreang	100	Persen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	3.000.000,00
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Soreang	0	Unit	-	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	Unit	2.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Soreang	1	Unit	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Unit	1.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Soreang	100	Persen	335.170.200,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	321.170.200,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Soreang	1	Laporan	2.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	2.000.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Soreang	1	Laporan	50.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	36.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Soreang	1	Laporan	283.170.200,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	283.170.200,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Kecamatan Soreang	100	Persen	110.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	108.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Soreang	9	Unit	60.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9	Unit	60.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Soreang	5	Unit	3.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5	Unit	3.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Soreang	1	Unit	25.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Unit	25.000.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Soreang	1	Unit	22.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Unit	20.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	Kecamatan Soreang	100	Persen	292.798.469,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	373.768.200,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan Soreang	100	Persen	8.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	8.000.000,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Soreang	1	Laporan	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	1.000.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	7.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	7.000.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	Kecamatan Soreang	100	Persen	3.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	3.000.000,00
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	1.000.000,00
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	1	Laporan	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	1.000.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	1	Laporan	1.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	1.000.000,00
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Soreang	100	Persen	20.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	20.000.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	20.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	20.000.000,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	Kecamatan Soreang	100	Persen	261.798.469,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	342.768.200,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Soreang	1	Laporan	261.798.469,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	342.768.200,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	Kecamatan Soreang	100	Persen	186.090.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	125.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Soreang	100	Persen	119.090.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	58.000.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Soreang	4	Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4	Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	-	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	3.000.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	1	Laporan	111.090.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	50.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina	Kecamatan Soreang	100	Persen	40.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	40.000.000,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Soreang	4	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Soreang	1	Laporan	5.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	5.000.000,00
7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Soreang	1	Laporan	5.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	5.000.000,00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Soreang	100	Persen	27.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	27.000.000,00
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	Kecamatan Soreang	10	Keluarga	-	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10	Keluarga	5.000.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Soreang	10	Keluarga	10.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10	Keluarga	5.000.000,00
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kecamatan Soreang	10	Keluarga	5.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10	Keluarga	5.000.000,00
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kecamatan Soreang	10	Keluarga	5.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10	Keluarga	2.000.000,00
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Soreang	10	Keluarga	7.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10	Keluarga	7.000.000,00
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Soreang	10	Keluarga	-	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10	Keluarga	3.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Soreang	100	Persen	61.700.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	55.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Soreang	100	Persen	51.700.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	45.000.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	1	Laporan	15.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	10.000.000,00
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Soreang	1	Laporan	36.700.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	35.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Soreang	100	Persen	10.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	10.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Soreang	1	Laporan	10.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	10.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Soreang	100	Persen	63.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	63.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Soreang	100	Persen	63.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	63.000.000,00
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	Kecamatan Soreang	50	Orang	10.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50	Orang	3.000.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Soreang	50	Orang	10.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50	Orang	10.000.000,00
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Kecamatan Soreang	50	Orang	10.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50	Orang	10.000.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	33.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	40.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	Kecamatan Soreang	100	Persen	104.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	84.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Kecamatan Soreang	100	Persen	104.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Persen	84.000.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	-	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	2.000.000,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	20.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	20.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	25.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	19.000.000,00
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	-	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	3.000.000,00
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	2.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	2.000.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	50.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	33.000.000,00
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	5.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	3.000.000,00
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Soreang	1	Dokumen	2.000.000,00	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	1.000.000,00

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2027		
							Lokasi	Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	Laporan	-	DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Laporan	1.000.000,00

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Ranhir Rencana Kerja (Renja)Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang berlandaskan Rencana Kerja (Renja)Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan RKPDP Tahun 2026 yang selaras antara prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten Bandung dan Kecamatan Soreang. Untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan serta perkembangan lingkungan organisasi.

Dengan komitmen dan sinergitas aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Soreang dan pelaksanaan evaluasi serta monitoring intern secara rutin dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan target kinerja sesuai dengan target capaian kinerja dan memberikan kontribusi terhadap kinerja pencapaian visi Kabupaten Bandung.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja)Renja Kecamatan Soreang Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021 – 2026, Renstra Ranhir Ranhir Kecamatan Soreang tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja (Renja)Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Selain itu, penyusunan Renja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Ranhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja (Renja)Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutkahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain hal-hal diatas, penyusunan Rencana Kerja (Renja)merupakan salah satu

upaya proses penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Soreang yang ditetapkan pada Peraturan Bupati Bandung nomor 75 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Ranhir Rencana Kerja (Renja)Kecamatan Soreang Tahun 2026 merupakan pedoman untuk proses penyusunan penganggaran pada tahap Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditentukan dan hasilnya akan dituangkan pada Perubahn Renja Tahun 2026 Kecamatan Soreang.

CAMAT SOREANG

Ttd

HARIS TAUPIK

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

a